

Tantangan dan Peluang Kebijakan “Merdeka Belajar” sebagai Upaya Pemerintah Menghadapi Era Society 5.0

Saekul Anwar

Politeknik STIA LAN Bandung
e-mail : Saekul.anwar@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Makalah ini mencoba memaparkan tentang Tantangan dan Peluang Implementasi kebijakan Merdeka Belajar ini dalam merespons periode *Society 5.0* yang di populerkan oleh Jepang sebagai resolusi atas industry 4.0. *Society 5.0* mencoba untuk menempatkan manusia pada hirarki tertinggi sesuai dengan kodratnya. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam menggali fenomena kebijakan merdeka belajar. Unit analisis dalam studi ini adalah kebijakan merdeka belajar yang mencakup 11 Episode merdeka belajar yang disampaikan oleh Kemendikbud. Kesebelas Episode ini merupakan respons atas *Society 5.0* ini terutama dalam hal Pendidikan. Walaupun belum memberikan porsi khusus terhadap 3 elemen penting *society 5.0* ini, 11 Episode ini merupakan terobosan yang layak menjadi perhatian kita semua, terutama yang tanggap pada hakikat manusia pada hirarki tertingginya. Tantangan yang dihadapi adalah terkait pemerataan penerapan kebijakan ini, sedangkan peluang yang dihadapi terkait dengan keberadaan pendidikan karakter sebagai tolok ukur keberhasilan dalam merespons era *society 5.0* ini.

Kata Kunci: merdeka belajar ; *society 5.0*; tantangan, peluang.

Challenges and Opportunities for the "Merdeka Belajar" Policy as the Government's Effort in Response to the Society 5.0 Era

This paper tries to describe the Challenges and Opportunities for the Implementation of the “Merdeka Belajar” policy in response to the Society 5.0 era which was popularized by Japan as a resolution to industry 4.0. Society 5.0 tries to place humans at the highest hierarchy according to their nature. The writer employed a qualitative approach to excavate phenomena related to Merdeka Belajar policy. The unit of analysis in this study was “merdeka belajar” policy which includes 11 episodes issued by the Ministry of Education and Culture. These eleven episodes were a response to Society 5.0, especially in terms of education. Even though this policy has not given a special portion to these 3 important elements of society 5.0, these 11 episodes are a breakthrough that deserves our attention, especially those who are responsive to human nature at the highest hierarchy. The challenges faced are related to the equitable implementation of this policy, while the opportunities faced are related to the existence of character education as a measure of success in responding to the society 5.0 era.

Keywords: merdeka belajar; *society 5.0*; challenges, opportunities.

A. PENDAHULUAN

Perubahan yang begitu cepat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sekarang ini telah mengubah kondisi masyarakat dan dunia industri. Transformasi digital telah melahirkan nilai, aturan dan norma baru dan menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan perindustrian di berbagai negara di belahan dunia ini. Dalam menghadapi *global-tren* tersebut, "*Society 5.0*" hadir menjadi sebuah konsep utuh dalam Rencana Dasar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ke-5, yang dirujuk jajaran Kabinet Jepang pada Januari 2016 (Fukuyama, 2018). Gagasan *Society 5.0* ini diyakini menjadi salah satu bentuk strategi pertumbuhan untuk Jepang. Sehingga pada 21 Januari 2019 konsep ini secara sah diresmikan oleh Jepang sebagai upaya resolusi terhadap *industry 4.0*.

Adanya konsep *Industry 4.0* dan *Society 5.0* menandakan bahwa kita saat ini sedang hidup di zaman baru dan berbeda, dimana globalisasi dan transformasi teknologi digital sudah melibatkan Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan robotika dan membawa perubahan yang sangat besar pada masyarakat. Tentunya, perubahan ini membawa dampak yang sangat signifikan di berbagai elemen kehidupan kita.

Pada dasarnya konsep resolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 tidak jauh berbeda. Jika industri 4.0 lebih mengutamakan AI, dan kecerdasan buatan sebagai komponen utamanya, maka Society 5.0 lebih memusatkan perhatian pada konteks keberadaan manusia itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa adalah Society 5.0 hanya menggunakan teknologi modern sebagai sarana dan menempatkan manusia sebagai unsur utamanya.

Keberadaan Society 5.0 menyempurnakan ide atau gagasan yang telah ada sebelumnya. Kita semua memahami bahwa Society 1.0 merupakan masa dimana manusia berada di zaman berburu dan mengenali tulisan. Society 2.0 menandakan manusia berada di masa pertanian atau bercocok tanam.

Adapun Society 3.0 membawa manusia ke periode industri dimana manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk membantu menyelesaikan kegiatan harian. Di zaman Society 4.0 manusia telah akrab dengan dunia komputer serta internet. Sehingga, Society 5.0 pada akhirnya menyempurnakan zaman dimana semua bentuk teknologi merupakan hal yang tak terpisahkan dari manusia itu sendiri. Internet tidak hanya dimanfaatkan untuk saling bertukar informasi saja, tapi juga untuk menjalankan kehidupan kita. Society 5.0 menetapkan inovasi sebagai prasyarat yang diperlukan untuk memecahkan masalah SDGs di masyarakat (Keidanren, 2016; SCTI, 2019).

Pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan gagasan masyarakat 5.0 ini. Dalam merespon tantangan era society 5.0, dunia pendidikan mengemban tugas yang tidak ringan untuk mengangkat martabat manusia. Selain pendidikan, elemen-elemen lain dan pemangku kepentingan serta pembuat kebijakan seperti unsur pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan seluruh lapisan masyarakat juga turut serta dalam menyambut *society 5.0* ini.

Dalam merespon *society 5.0* ini, dunia pendidikan di Indonesia memerlukan transformasi paradigma pendidikan. Salah satu contohnya adalah pendidik harus mengurangi perannya sebagai *satu satunya sumber ilmu*, pendidik diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi pertumbuhan kreativitas anak didiknya. Pendidik diharapkan lebih mengemban peran sebagai fasilitator, tutor, *inspirator* dan pembelajar yang memotivasi anak didiknya untuk "*Merdeka Belajar*," seperti yang dipaparkan Dwi Nurani, S.KM, M.Si, Analis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Direktorat Sekolah Dasar ketika menjadi narasumber seminar nasional "*Menyiapkan Pendidikan Profesional Di Era Society*" pada Rabu, 03 Februari 2021.

Kita tahu bahwa pendidikan di abad ke-20 dan 21 telah mengalami perubahan paradigma. Pada abad ke-20, pendidikan terfokus pada pengetahuan yang berasal dari teks buku dan cenderung terpusat pada cakupan lokal dan nasional. Sementara ini, pada abad 21, pandangan Pendidikan merambah pada berbagai tingkat usia, setiap peserta didik merupakan kelompok pembelajar. Proses belajar dapat berasal dari mana saja bukan hanya dari buku, melainkan juga bisa dari berbagai platform teknologi & informasi semacam internet dan lain sebagainya.

Keberadaan kebijakan “Merdeka belajar” yang dikeluarkan oleh Mendikbud, Nadima Karim, merupakan strategi untuk mentransformasi pendidikan dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang mempunyai jati diri Pelajar Pancasila. Makalah ini mencoba untuk mendeskripsikan sejauh mana konsep “Merdeka Belajar” ini menjawab peluang dan tantangan menghadapi tatanan dunia yang sudah memasuki era Society 5.0.

B. PEMBAHASAN

Teori merdeka belajar dipopulerkan oleh Carl Ransom Roger dalam buku nya berjudul “Freedom to Learn” yang pertama kali dikenalkan pada tahun 1969. Teori merdeka belajar ini bermula dari teori humanisme yang meyakini bahwa proses belajar itu terpusat pada inisiatif siswa untuk belajar (learner-centered), yang kemudian dikenal dengan istilah *student-learning-centered* (Cahyana, 2020). Rogers meyakini bahwa setiap individu dapat mewujudkan tujuan mereka. Ini berarti bahwa orang tersebut terikat pada perkembangan situasi terkini, pengalaman dan perasaan subjektifnya, terus tumbuh dan berubah.

Society 5.0 berusaha menempatkan manusia pada hirarki Tertinggi sesuai dengan kodratnya sebagai penyempurnaan dari industry 4.0. Lahirnya era society 5.0

menjadi sebuah tanggapan atas akibat yang ditimbulkan revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan lahirnya disrupsi yang menjadikan dunia yang penuh gejolak, ketidakpastian, kompleksitas dan ambiguitas. Masa depan pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0 sekarang ini telah mengakibatkan banyak Lembaga pendidikan di Indonesia mengusung semangat digitalisasi di berbagai bidang. Apabila digitalisasi ini dapat ditangani dengan baik dan terintegrasi dengan baik dengan masyarakat Indonesia, maka pendidikan di Indonesia akan mampu menghadapi tantangan society 5.0 (Darmaji, 2019).

Society 5.0 ini memiliki tujuan untuk membantu masyarakat mewujudkan harapan mereka untuk dapat menikmati kehidupan secara utuh. Ekonomi dan teknologi berkembang dan tumbuh untuk tujuan tersebut, bukan untuk kemakmuran kelompok tertentu, sesuai dengan konsep yang dicanangkan pemerintah. Walaupun Society 5.0 diketahui berasal dari Jepang, tujuan utamanya tidak hanya untuk kesejahteraan satu negara saja melainkan untuk semua umat manusia di berbagai belahan dunia. Kerangka kerja dan teknologi yang dikembangkan di masa society 5.0 ini di percaya akan memberikan sumbangsih yang nyata dalam menyelesaikan tantangan sosial di seluruh dunia (Fukuyama, 2018). Oleh karena itu, Indonesia juga tidak bisa mengabaikan keberadaan konsep society 5.0 ini begitu saja, khususnya dalam hal Pendidikan. Kita semua menyadari bahwa Pendidikan merupakan bagian yang tidak bisa dipandang sebelah mata dalam pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara di era disrupsi seperti saat ini.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk merespons society 5.0 ini adalah dengan adanya sebuah inovasi kebijakan penyelenggaraan Pendidikan yang kita kenal dengan “Merdeka Belajar”. “Merdeka Belajar” mencoba untuk

Di Indonesia sendiri konsep merdeka belajar kembali populer setelah Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mencetuskan gagasan “Merdeka belajar” sesudah dia dilantik. Sampai dengan September 2021, paling tidak terdapat 11 (sebelas) episode Merdeka Belajar yang telah diluncurkan (ditpsd.kemendikbud.go.id). Adapun 11 Episode ini adalah sebagai Berikut:

1. **Episode 1 - mencakup 4 (empat) Pokok Kebijakan Merdeka Belajar, Yang meliputi: Ujian sekolah dengan standar USBN, Dihapusnya Ujian Nasional dan berubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survey Karakter, Perubahan dalam mendesain dan memformat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), dan Membuat kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru lebih untuk mengakomodir ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah).**
2. **Episode 2 - tentang Kampus Merdeka yaitu Merdeka Belajar di perguruan tinggi yang lebih otonom. Prinsip dari kampus merdeka ini adalah perubahan paradigma pendidikan untuk menjadi lebih otonom dengan budaya pembelajaran yang inovatif.**
3. **Episode 3 - berkaitan dengan Perubahan Mekanisme Dana BOS**
4. **Episode 4 - berkaitan dengan Program Organisasi Penggerak**
5. **Episode 5 - berkaitan dengan Guru Penggerak**
6. **Episode 6 - berkaitan dengan Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi**
7. **Episode 7 - tentang Program Sekolah Penggerak**
8. **Episode 8 - menjadikan SMK Pusat Keunggulan**
9. **Episode 9 - tentang KIP Kuliah Merdeka**
10. **Episode 10 - Perluasan Program Beasiswa LPDP**
11. **Episode 11 - memusatkan pada Kampus Merdeka Vokasi**

Kesebelas episode ini tentunya akan berkembang lebih jauh lagi menuju penyempurnaan dalam **penerapannya**. Namun tentunya akan banyak peluang dan tantangan yang dihadapi dari penerapan “Merdeka Belajar” ini.

1. Tantangan.

Kebijakan merdeka belajar yang dicetuskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dianggap akan membawa perubahan yang cukup besar, sehingga berbagai pertanyaan timbul seperti: Bagaimana mekanisme implementasi kebijakan ini? Apakah kebijakan ini benar benar “*applicable*” atau dapat diterapkan di seluruh pelosok nusantara, dengan berbagai macam kondisi geografis dan keaneekaragaman budaya? Dan bagaimana cara yang efektif untuk mengoptimalkan “merdeka belajar” ini ditengah kondisi pandemi yang tak kunjung usai serta masih banyak lagi permasalahan yang belum terselesaikan. Dalam menjawab tantangan ini ,tentunya kita perlu melihat kembali hakikat dari konsep society 5.0 ini dan bagaimana seharusnya konsep ini bisa diterapkan di Negara Keatuan Republik Indonesia yang secara kondisi geografisnya berbeda jauh dengan Jepang sebagai pencetus utama konsep ini.

Kita tidak bisa menyangkal bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dan akses keseluruh penjuru pelosok negeri menjadi tantangan yang luar biasa bagi percepatan menerapkan kebijakan merdeka belajar ini.

Dalam merespon era society 5.0 , kendala yang utama dihadapkan bagi penerapan merdeka belajar di Indonesia ini, terutama di daerah terisolir terluar dan terpinggir, dan khususnya pada perguruan tinggi yang mencetak generasi inovatif dan produktif adalah diantaranya:

1. Kurangnya sistem pembelajaran inovatif di kampus-kampus tersebut seperti penyesuaian kurikulum pembelajaran yang masih kurang dalam menumbuh kembangkan keahlian mahasiswa dalam bidang Teknologi Informasi (IT), Operational Technology (OT), Internet of Things (IoT), dan Big Data Analytic, serta mengintegrasikan objek fisik, digital dan manusia untuk menghasilkan sumberdaya yang terampil dan kompeten terutama dalam aspek literasi data, teknologi dan sumberdaya manusia.
2. Rekonstruksi terhadap kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif terhadap *society 5.0* dalam mengembangkan lintas disiplin ilmu dan program studi yang dibutuhkan juga belum sepenuhnya ada. Selain itu, mulai diupayakannya program Cyber University, seperti sistem perkuliahan distance learning, sehingga mengurangi intensitas pertemuan dosen dan mahasiswa. Cyber University ini nantinya diharapkan menjadi jalan keluar bagi anak bangsa di penjuru daerah untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas.
3. Masih minimnya terobosan di bidang riset dan pengembangan yang menuju kearah respons *society 5.0* dan ekosistem riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengembangan di Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, LPNK, Industri, dan Masyarakat.
4. Terobosan inovasi dan penguatan sistem inovasi untuk meningkatkan produktivitas industri dan meningkatkan perusahaan pemula berbasis teknologi juga masih belum sepenuhnya ada.

Pengembangan sumber daya manusia harus menjadi prioritas. Bagaimanapun, orang harus belajar hal-hal baru. Pendekatan pendidikan harus direvisi agar lebih dinamis, dengan keterampilan yang fleksibel, untuk menanggapi permintaan saat ini. Bisnis harus secara aktif bekerja sama dengan universitas untuk berpartisipasi dalam mendidik generasi baru yang siap bekerja dengan sistem pintar (Wilkinson, 2018).

2. Peluang

Era Society 5.0 tentunya juga membuka banyak peluang bagi dunia Pendidikan di Indonesia. Hakikat *society 5.0* yang menjadikan manusia sebagai objeknya dan terpusat pada 3 hal utama yaitu, AI, Robot dan IoT dimaknai sebagai era konsep masyarakat yang di dahului oleh era berburu (*Society 1.0*), pertanian (*Society 2.0*), industri (*Society 3.0*), dan teknologi informasi (*Society 4.0*).

11 (sebelas) Episode merdeka belajar sebagai rangkaian dari kebijakan yang telah dicetuskan oleh kemendikbud memungkinkan adanya percepatan pencapaian tujuan Bangsa Indonesia sesuai yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. *Internet of things (IoT), Virtual/Augmented Reality, Artificial Intelligence (AI)* dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh pelajar. Risdianto (2019) menekankan ada 4 hal penting yang harus dimiliki oleh pendidik guna menyiapkan generasi *Society 5.0* yaitu *creativity, critical thinking, communication dan collaboration*.

Selain itu, Pendidikan karakter sesuai dengan yang tertuang pada episode 1 (satu) Merdeka Belajar ini juga bisa menjadi tolok ukur keberhasilan terhadap menanggapi era *society 5.0*. Karena kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia yang saat ini diyakini berada

di Era Revolusi Industri 4.0, belum matang secara mental. Bagaimana mungkin bangsa Indonesia berhasil melewati era 4.0 dan siap menghadapi era baru yang dikenal dengan Era Society 5.0 padahal perilaku masyarakat tidak berubah Maryanti, dkk., (2020) Pendidikan moral dan karakter akan menjadi penopang penting dalam menghasilkan generasi. berwatak dan berkarakter baik.

Selain itu keberadaan guru yang kompeten juga sangat diperlukan untuk ketercapaian Pendidikan moral ini. Kajian pendidikan terhadap keberadaan guru pada akhir abad 20 dan awal abad 21 mengungkap fenomena yang semakin menempatkan guru sebagai sebuah profesi. Di negara-negara yang sudah maju, profesi guru diakui benar-benar sebagai profesi yang memiliki hak dan kondisi yang sama dengan profesi lain, sehingga masyarakat tidak ragu atau berpikir lama untuk memilih jabatan guru. Tentunya, kita juga harus mampu merubah paradigm bahwa guru juga merupakan elemen yang tidak bisa dipandang sebelah mata dalam pencapaian tujuan society 5.0 ini.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kebijakan merdeka belajar menjadi salah satu respon pemerintah dalam menanggapi tantangan perwujudan Society 5.0 secara utuh. Dalam implementasinya, terdapat banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dan juga berbagai macam peluang baru tercipta. Tantangan yang dihadapi adalah terkait pemerataan dalam penerapan kebijakan ini ke seluruh pelosok negeri. Adapun peluang yang timbul adalah terkait pengoptimalan Pendidikan karakter sebagai tolok ukur keberhasilan perwujudan *Society 5.0* ini. Namun yang pasti, dalam menghadapi Society 5.0 ini dibutuhkan berbagai macam inovasi kebijakan seperti merdeka belajar ini di berbagai elemen kehidupan bernegara, berbangsa dan bertanah air.

Rekomendasi Kajian selanjutnya adalah terkait dengan evaluasi kebijakan merdeka belajar ini dan bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap kebijakan merdeka belajar ini. Karena seperti yang kita tahu kebijakan pendidikan terutama di tatanan kurikulum seringkali berubah sehingga tafsiran masyarakat terhadap keberlangsungan merdeka belajar ini bisa menjadi evaluasi kedepannya.

REFERENSI

- Cahyana. (2020). Belajar merdeka sejak usia Dini. Retrieved from <https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/berita/belajar-merdeka-sejak-usia-dini-1588120589>
- Fukuyama, M. (2018). Society 5.0: Aiming for a new human-centered society. *Japan Spotlight*, 1, 47-50.
- Japan Business Federation (Keidanren) (2016), *Toward Realization of the New Economy and Society. Reform of the Economy and Society by the Deepening of "Society 5.0"*, Keidanren, Tokyo.
- Maryanti, N., Rohana, R., & Kristiawan, M. (2020). The Principal's Strategy In Preparing Students Ready To Face the Industrial Revolution 4.0. *International Journal of Educational Review*, 2(1), 54-69. <https://doi.org/10.33369/ijer.v2i1.10628>
- Potočan, V., Mulej, M., & Nedelko, Z. (2020). Society 5.0: balancing of Industry 4.0, economic advancement and social problems. *Kybernetes*, 50(3), 794-811. doi:10.1108/k-12-2019-0858
- Risdianto, E. (2019). Analisis pendidikan indonesia di era revolusi industri 4.0. Bengkulu: Universitas Bengkulu. Diakses dari https://www.researchgate.net/profile/Eko_Risdianto/publication/332415017_ANALISIS_PENDIDIKAN

KN 5.0
IA

WEBINAR
KONFERENSI NASIONAL
ILMU ADMINISTRASI



**Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi
Era Society 5.0**

20
21
13 Oktober

N_INDONESIA
DI_ERA_REVOLUSI_INDUSTRI_40/li
nks/5cb4509b4585156cd7993519/ANA
LISIS PENDIDIKAN-INDONESIA-DI-
ERA-REVOLUSI-INDUSTRI-40. pdf.

Wilkinson, A., & Flowers, B. S. (2018).
Realistic hope: Facing global challenges.